

**ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH YANG TERJADI PADA
AKAD MURABAHAH DI BMT IFTIKHAR**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh :

**DAHLIA PUTRI MAYLINDA
I000160024**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH YANG TERJADI
PADA AKAD MURABAHAH DI BMT IFTIKHAR**

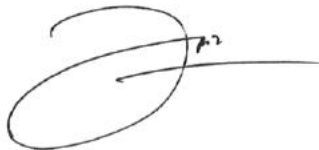
PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

DAHLIA PUTRI MAYLINDA
I000160024

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'Y' followed by a horizontal line and a small flourish.

Yayuli, S.Ag., M.P.I
NIDN: 0612056404

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH YANG TERJADI
PADA AKAD MURABAHAH DI BMT IFTIKHAR**

**OLEH
DAHLIA PUTRI MAYLINDA
I000160024**

**Telah Dipertahankan Didepan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Kamis 4 Maret 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

Dewan Penguji:

1. Yayuli, S.Ag.,M.PI
(Ketua Dewan Penguji)
2. Fauzul Hanif Noor Lathief, Lc.,M.Sc
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Azhar Alam, S.E., LC., M.SEI
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,




Dr. Syamsul Hidayat, M. Ag
NIDN. 0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 17 Maret 2021

Penulis



DAHLIA PUTRI MAYLINDA
I000160024

ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH YANG TERJADI PADA AKAD MURABAHAH DI BMT IFTIKHAR

Abstrak

BMT termasuk kategori lembaga keuangan mikro non bank yang bersifat informal, karena keberadaan BMT tidak memerlukan legitimasi formal dari Bank Indonesia serta sebagai balai usaha mandiri terpadu yang merupakan bayt al-mal wa at-tamwil, yaitu lembaga yang mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha para pengusaha kecil dan mendorong bentuk-bentuk investasi dengan tujuan pemberdayaan usaha duniawi dan ukhrawi melalui infak, zakat, sedekah. Rumusan masalah skripsi ini sebagai berikut: 1) Menganalisis faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi pada akad murabahah di BMT Iftikhar Wangen. 2) Menganalisis Strategi penanganan kasus pembiayaan bermasalah yang terjadi pada akad Murabahah di BMT Iftikhar Wangen. Hasil penelitian menunjukkan BMT Iftikhar telah mempunyai prosedur penyelesaian pada pembiayaan (*murabahah*) di BMT Iftikhar Wangen. Dan BMT Iftikhar Wangen dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* sudah menerapkan konsep Islam atau prinsip-prinsip Syariah dan Fatwa-fatwa DSN-MUI.

Kata kunci: bermasalah, BMT, murabahah, akad, pembiayaan

Abstract

BMT is included in the category of informal, non-bank microfinance institutions, because the existence of BMTs does not require formal legitimacy from Bank Indonesia as well as an integrated independent business center which is bayt al-mal wa at-tamwil, namely institutions that develop productive businesses and invest in improving the quality of small business entrepreneurs and encouraging forms of investment with the aim of empowering worldly and ukhrawi businesses through donations, zakat, alms. The formulation of the problem in this thesis is as follows: 1) Analyze the factors that cause default that occurs in the murabahah contract at BMT Iftikhar Wangen. 2) Analyzing strategies for handling cases of default that occurred in the Murabahah contract at BMT Iftikhar Wangen The results showed that BMT Iftikhar already had a default settlement procedure on financing (*murabahah*) at BMT Iftikhar Wangen. And BMT Iftikhar Wangen in handling problematic financing on the murabahah contract has implemented the Islamic concept or Sharia principles and DSN-MUI fatwas

Keywords: troubled, BMT, murabahah, contract, financing.

1. PENDAHULUAN

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil. Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang

diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh karena itu, peranan perbankan dalam suatu negara sangatlah penting. Tidak ada satupun negara yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangannya.

Perkembangan Perbankan Syariah yang demikian cepat tentu saja sangat membutuhkan peningkatan sumber daya insani yang memadai dan mempunyai kompetensi dalam bidang perbankan syariah. Dikeluarkannya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan serta dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dan Majelis Ulama Indonesia Tahun 2003 menyebabkan banyak bank yang menjalankan prinsip Syariah. Hal ini dilakukan karena bank syariah terbukti memiliki keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi beberapa waktu lalu, serta mempunyai potensi pasar yang cukup besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan masih banyaknya kalangan umat Islam yang enggan berhubungan dengan perbankan yang menggunakan sistem ribawi.

Sejak saat itu lembaga keuangan syariah mulai bertumbuh dengan pesat. Hal ini terjadi juga karena implikasi dari kebijakan pemerintah di bidang keuangan perbankan. Keluarnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 membuka pintu lebar bagi terbentuknya lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank. Sebenarnya keberadaan koprasi syariah sudah ada sejak 1992 yaitu Baitul Maal Tamwil atau dikenal sebagai BMT untuk pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama BMT Bina Inan Kamil.

Latar belakang berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syariah di Indonesia, yakni pada tahun 1990-an. BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan PP No. 72/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil. Pada saat bersamaan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) aktif melakukan pengkajian intensif tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia dan akhirnya terbentuklah BMTBMT di Indonesia. Hasil positif mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama kalangan usaha kecil dan menengah yang sering memanfaatkan pelayanan BMT. Hal ini disebabkan mereka memperoleh banyak keuntungan dan kemudahan yang tidak diperoleh sebelumnya dari lembaga sejenis yang menggunakan pendekatan konvensional.

BMT termasuk kategori lembaga keuangan mikro non bank yang bersifat informal, karena keberadaan BMT tidak memerlukan legitimasi formal dari Bank

Indonesia serta sebagai balai usaha mandiri terpadu yang merupakan bayt al-mal wa at-tamwil, yaitu lembaga yang mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha para pengusaha kecil dan mendorong bentuk-bentuk investasi dengan tujuan pemberdayaan usaha duniawi dan ukhrawi melalui infak, zakat, sedekah. Biasanya dalam BMT sudah memiliki mangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami berbagai hambatan, sehingga mereka membutuhkan tambahan dana. Jika kalangan pelaku usaha kecil mengalami kesulitan modal/ dana untuk usahanya, bisa meminjam modal/ dana kepada pihak BMT.

2. METODE

Dalam suatu penelitian diperlukan pengkajian, hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut Zahratul Liana dalam skripsinya yang berjudul Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring. Faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Insan Sejahtera dikarenakan pihak BMT (Faktor internal) dan nasabah itu sendiri (Faktor eksternal) seperti: Penurunan pendapatan usaha yang diperoleh nasabah, nasabah mengalami kepailitan dan nasabah kesulitan dalam melakukan pembayaran. Sehingga dilakukan penanganan dengan cara dilakukan penjadwalan kembali (rescheduling), penyusunan kembali (restructuring), penjualan jaminan (offset penjualan) dan penghapusan pembiayaan. Ellsya Puji Pangestu dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Mira Hira Tanon)*. Strategi dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah terdiri dari beberapa tahapan. yaitu: pertama dengan melakukan pendekatan kepada anggota. Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi pada anggota serta memberikan alternatif solusinya.

Kedua, penagihan secara intensif dalam hal ini dilakukan penagihan secara langsung dengan mendatangi anggota ke lokasi. Ketiga, teguran dengan melayangkan surat peringatan kepada anggota. Keempat, rescheduling yaitu perpanjangan waktu jatuh tempo kepada anggota. Kelima restructuring yaitu dengan menambah jumlah kredit dan menambah equity (menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik). Keenam, hapus buku (write off) yaitu langkah terakhir yang dilakukan untuk membebaskan anggota dari beban hutangnya. Eko Prasetyo dalam skripsinya yang berjudul *Strategi*

Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Maal Tamwil Ta'awun Cipular. BMT Ta'wun dalam menanggulangi pembiayaan murabahah bermasalah cukup baik. Artinya perkembangan Non Performing Financing (NPF) pertiga tahun terakhir ini mengalami penurunan meskipun masih saja terdapat nasabah yang bermasalah. Jumlah persentase NPF di tahun 2007 yaitu 10,95%, tahun 2008 3,94%, dan tahun 2009 3%. Hal tersebut tentunya sangat membanggakan BMT Ta'awun dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Baitul Maal Wat Tamwil adalah sebuah lembaga keuangan informal yang tumbuh sejak Rasulullah SAW. Pada dekade awal tahun 80-an di Indonesia lembaga ini pernah tumbuh subur. dan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, tetapi perkembangannya tidak diimbangi dengan manajemen yang baik, sehingga mengalami kegagalan.

Dan lembaga keuangan ini mengalami kebangkitan kembali pada awal tahun 1991 sampai dengan sekarang dan mengalami perbaikan dalam berbagai segi. Kebangkitan tersebut diawali dengan berdirinya BPRS di Bandung pada bulan Agustus 1991, Bank Muamalat Indonesia (BMI) diawal bulan juni 1992.

Pada tanggal 13 Maret 1995 ketua ICMI, ketua umum MUI, dan Dirut BMI membentuk Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) dibawah naungan Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINKUB), yang bertujuan menumbuhkembangkan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi rakyat dan pengusaha kecil dengan mengembangkan Baitul Maal Wat Tamwil, yang lebih dikenal dengan sebutan "BMT". Berangkat dari tujuan itulah BMT IFTIKHAR ingin ikut dalam perjuangan meningkatkan ekonomi umat.

KSPPS BMT Iftikhar merupakan salah satu badan usaha yang berbentuk koperasi yang berdiri pada tanggal 16 September 2013 oleh Anggota pendiri KSPPS BMT Iftikhar, dengan tujuan berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi umat. KSPPS BMT Iftikhar merupakan salah satu lembaga intermediasi yang berperan sebagai penghimpun dana dari anggota dan disalurkan kembali kepada anggota (masyarakat).

KSPPS BMT Iftikhar bertempat di Jl. Pabrik Aqua – Delanggu Km 0,3 Polanharjo, Klaten. Merupakan tempat yang sangat strategis yang mana salah satu daerah perekonomiannya meningkat sangat baik diantara kecamatan yang ada di Visi, Misi dan Tujuan BMT Iftikhar.

Visi, Visi KSPPS BMT Iftikhar adalah Bersama mewujudkan kualitas masyarakat disekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT dan POKUSMA (Kelompok Usaha Muamalah) yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan dan berkehati-hatian.

Misi Misi KSPPS BMT Iftikhar adalah Bersama mengembangkan POKUSMA dan BMT yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan dan berkehati-hatian sehingga terwujud kualitas masyarakat disekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera. Memaksimalkan pelayanan pada anggota, Meningkatkan kegiatan BMT, Penataan dan pembenahan system operasional prosedur dan system operasional management, Tujuan BMT Iftikhar KSPPS BMT Iftikhar Bersama bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat disekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera.

Dalam proses pengajuan pembiayaan murabahah pada awal bagian marketing atau account officer menganalisa kebutuhan calon nasabah pembiayaan. Hal yang perlu diketahui adalah barang apa saja yang dibutuhkan dan tujuan pembiayaan tersebut. Sebagai lembaga keuangan yang berbasis pada syari'ah Islam maka syarat halal dalam tujuan penggunaan pembiayaan mutlak diperlukan. Analisis dilakukan oleh BMT Iftikhar Wangen terhadap penggunaan pembiayaan yang diberikan hanya untuk usaha atau kebutuhan halal. *Murabahah* sebagai bentuk akad jual beli dimana pihak BMT meminta margin keuntungan maka pada awal perjanjian atau akad pembiayaan murabahah terjadi tawar menawar antara pihak BMT dengan nasabah. Setelah terjadi kesepakatan margin antara kedua belah pihak maka dibentuklah akad pembiayaan murabahah.

Dalam akad Murabahah BMT Iftikhar Wangen yang menjadi subyek hukum adalah BMT Iftikhar yang berkedudukan di Wangen Polanharjo Klaten dalam hal ini diwakili ATIK MASRUROH,A.Md dalam jabatan sebagai asisten /Manager bertindak atas nama BMT Iftikhar, selanjutnya disebut Pihak Pertama. Kemudian SUNARI yang beralamat di Jl. Pabrik Aqua – Delanggu Km 0,3 Polanharjo, Klaten sebagai Pihak kedua.

Dalam hal ini berdasarkan pengertian subyek hukum, dalam akad murabahah BMT Iftikhar di atas merupakan rechtspersoon dan telah memenuhi syarat subyek hukum akad murabahah yang ditentukan seperti Masyarakat umum yang bertempat

tinggal di wilayah lingkungan kerja BMT yang memenuhi kriteria: Mempunyai Usaha/Penghasilan. Diutamakan mempunyai simpanan aktif di BMT, Lulus dari wawancara dan kelayakan kuantitatif tim BMT, Mitra yang masih mempunyai utang pembiayaan tidak dikenakan untuk mengambil pembiayaan sebelum melunasi utangnya atau dengan persetujuan dari Komite Pembiayaan BMT.

Sukarela (ridha) atau tidak dalam keadaan terpaksa, Secara yuridis setiap perjanjian harus mencantumkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi obyeknya sebab bila tidak dibuat secara rinci, dapat menimbulkan ketidakpastian atau kekeliruan. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang telah memenuhi ketiga unsur di atas harus juga memuat alasan/sebab kenapa kontrak itu dibuat.dengan kata lain, perlu secara jelas dan tegas dimuat sebab mengapa kontrak itu dibuat.

Pada Pasal 1 di dalam Akad Murabahah BMT Iftikhar Para pihak sepakat untuk mengadakan akad pembiayaan dengan akad Murabahah yaitu pembiayaan dengan prinsip jual-neli (al-bai) dengan rukun sebagai berikut: Pihak pertama sebagai Ba'i (penjual). Pihak kedua sebagai Musyatarî'(pembel)/Muwakili. Obyek pembiayaan sebagai sebagai Mabi' (Barang Dagangan). Jumlah Pembiayaan dan Margin keuntungan bersama sama sebagai Tsaman (Ketentuan Harga). Cara Pengadaan barang, Penerimaan Barang dan jangka waktu serta cara pembayaran sebagai sighthat (Ketentuan jual beli).

Pihak pertama sebagai Ba'i (penjual), Pihak kedua sebagai Musyatarî' (pembel)/Muwakili, Obyek pembiayaan sebagai sebagai Mabi' (Barang Dagangan), Jumlah Pembiayaan dan Margin keuntungan bersama sama sebagai Tsaman (Ketentuan Harga), Cara Pengadaan barang, Penerimaan Barang dan jangka waktu tertentu.

Di BMT Iftikhar Wangen terdapat denda yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada BMT atas keterlambatan yang disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah, dan bukan karena kesengajaannya (karakter) dan sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Denda yang diperuntukkan untuk nasabah yang telat bayar hutang di BMT ini harus berupa bentuk nominal seperti terdapat pada ketentuan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Dengan diberlakukannya sanksi/denda ini di BMT didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Denda kepada nasabah ini, BMT

berhak mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban piutang *murabahah* dengan indikasi antara lain: Adanya unsur kesengajaan yaitu nasabah mempunyai dana tetapi tidak melakukan pembayaran piutang *murabahah*. Adanya unsur penyalahgunaan dana yaitu nasabah mempunyai dana tetapi digunakan terlebih dahulu untuk hal lain

4. PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berupa data-data dari observasi, wawancara serta dokumentasi tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BMT Iftikhar Wangen dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Faktor-faktor yang membuat terjadinya pembiayaan bermasalah antara lain, Pembiayaan yang tidak lancar Pembiayaan dimana mudhorib tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan Perjanjian yang tidak menepati jadwal angsuran Pembiayaan yang memiliki potensi menunggak di waktu tertentu

BMT Iftikhar Wangen dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* sudah menerapkan konsep Islam atau prinsip-prinsip Syariah dan Fatwa-fatwa DSN-MUI. *Al-Sulh* (perdamaian) yaitu mengakhiri perselisihan antara kedua belah pihak secara damai. BMT Iftikhar Wangen menggunakan cara ini dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* yaitu dengan: penagihan secara intensif (penagihan tidak langsung dan langsung) untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Setelah itu memberi surat peringatan/teguran. Apabila penagihan secara intensif dan memberikan surat peringatan nasabah masih belum melakukan pembayaran maka BMT Iftikhar Wangen akan memberikan keringanan dengan penjadwalan kembali (*Rescheduling*) berdasarkan Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005. Persyaratan kembali (*Reconditioning*) berdasarkan Fatwa DSN No. 46/SDN-MUI/II/2005. Penataan kembali (*Restructuring*) berdasarkan Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005.

Strategi penanganan pada pembiayaan bermasalah akad (*murabahah*) di BMT Iftikhar Wangen yaitu : Tahap awal dengan melakukan penagihan langsung oleh lembaga kepada anggota yang bersangkutan, penagihan dilakukan berjenjang mulai dari tingkat AO(Account Officer), bag.penagihan, Koordinator, Kepala Cabang dan ataupun bersilang. Tahap kedua mengupayakan agar anggota menjual agunan pembiayaannya sendiri untuk pelunasan pembiayaannya. Penjualan agunan dapat melalui lembaga maupun dibawah tangan. Penjualan agunan di bawah tangan dilakukan agar anggota

masih diberikan kesempatan untuk menawarkan/menjual sendiri agunannya. Tahap ketiga melalui perundingan kembali antara lembaga sebagai *sohibul maal* dan anggota sebagai *mudhorib* Tahap keempat melalui jalur hukum. Tahap kelima Hapus Buku (Writeoff).

Sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut : Sebagai upaya pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan (*murabahah*) di BMT Iftikhar Wangen, alangkah baiknya BMT lebih teliti dan berhati-hati lagi dalam hal pemberian pembiayaan kepada nasabah dan selalu melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang disalurkan. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan *literature* dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang kajian ekonomi Islam khususnya dalam lembaga keuangan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, D. (2009). In *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya* (p. 83). Bogor: NUR no P.VI/1/TL.02.1/410.
- Ahmad, H. R. (n.d.). Manajemen BaitulMal Wa Tamwil. Bandung: CV Pustaka.
- alground, L. L. (2001). In *Perbankan Syariah Prinsip Praktik Prospek*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Z. (2010). In *Memahami Bank Syariah, Peluang Tantangan dan Praktek* (p. 452). Jakarta: Kencana.
- Ariyani, F. (2020). Admin BMT Iftikhar Wangen. (D. P. Maylinda, Interviewer)
- Buchori, N. s. (2009). *Koperasi Syari'ah*. Jawa Timur: Mashun.
- Djazuli, A., & Yanwari, Y. (2002). In *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan* (p. 184). Jakarta: Rajawali Press.
- Hakim, L. (2012). In *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (pp. 116-117). Yogyakarta: Erlangga.
- Hasan, A. (1991). In *Bulughul Maram* (p. 496). Bangil: CV Pustaka Tamaam.
- Kasidi. (2014). *Management Risiko*.
- Kasmir. (2009). In *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (pp. 103-106). Jakarta: PT Raja Grafindo.

- Liana, Z. (2016). *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring*.
- Muhammad. (2002). In *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi* (p. 10). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Munawwir, A. W. (1997). In *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia* (p. 463). Surabaya: Pustaka Progresif Cet-IV.
- Nasional, D. S. (2005). *Konversi Akad Murabahah*. Retrieved Desember 24, 2020, from <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/8/>
- Nasional, D. S. (2005). *Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah*. Retrieved Desember 24, 2020, from <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/8/>
- Nasional, D. S. (n.d.). *Himpunan Fatwa Halal MUI*. Retrieved September 24, 2020, from [Http://www.Himpunan-Fatwa-HalalMajelis-Ulama-Indonesia-2010/Ht](http://www.Himpunan-Fatwa-HalalMajelis-Ulama-Indonesia-2010/Ht)
- Nasir, M. (1988). In *Metode Penelitian* (p. 63). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pangestu, E. P. (2017). *Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah studi kasus kspps BMT Hira Tanon*.
- Prasetyo, E. (2010). *Strategi Penanggulangan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil Ta'awun Cipulir*.
- Qazwa. (n.d.). *Akad Murabahah dalam Ekonomi*. Retrieved Maret 9, 2020, from <https://qazwa.id/blog/murabahah/>
- Ridwan, M. (2004). In *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (p. 126). Yogyakarta: UII Press.
- Rivai, V. (2010). In *Islamic Banking* (p. 681). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Siamat. (1995). In *Peranan Perbankan Syariah* (p. 47). Jakarta: Gema Insani Press.
- Soejono, A. (1999). In *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (p. 33). Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Sutedi, A. (2009). In *perbankan Syariah (Tinjauan dari Beberapa Segi Hukum)* (p. 122). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Umam, K. (2013). In *Manajemen Perbankan Syari'ah* (pp. 234-238). Bandung: CV Pustaka Setia Cetakan 1.
- Wirosa. (2005). In *Jual Beli Murabahah* (p. 1). Yogyakarta: UII Press.